

**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 92 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016- 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- bang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu disusun indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
- gat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 - 2021

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Pacitan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun di Kabupaten Pacitan.
6. Instansi Pemerintah Kabupaten adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

10. IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten.

11. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan Format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :
- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
 - b. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 30 - 12 - 2016

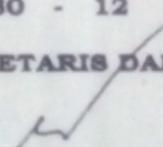
BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 30 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 92 TAHUN 2016
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA					
MISI I : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Akuntabel					
Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima	1	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil survey IKM minimal baik	Perangkat Daerah dg hasil IKM baik dibanding jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan IKM	4 Sekretariat Daerah	5 Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
	2	Pemeringkatan E Government (PeGI)	hasil penerapan terhadap pelaksanaan e-government di pemerintah kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dokumen Hasil Evaluasi Pemeringkatan e-Government
	1	Opini BPK	opini BPK atas laporan Keuangan Daerah	Inspektorat	Dokumen LHE Audit BPK RI
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	2	Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP	Sekretariat Daerah	Dokumen LHE Audit Menpan
	3	Nilai LPPD	Hasil Evaluasi LPPD	Sekretariat Daerah	Dokumen LHE Audit BPK RI

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA

MISI II : Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kehidupan Sosial Masyarakat

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	2 1 Rata-rata lama sekolah	3 jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	4 Dinas Pendidikan	5 Laporan Tahunan Perangkat Daerah
	2 Harapan lama sekolah	lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Dinas Pendidikan	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
	3 Nilai rata-rata ujian: - SD - SMP	rata-rata Nilai Akhir (NA) seluruh mata pelajaran dari semua sekolah dasar, Nilai Akhir merupakan gabungan dari Nilai Sekolah dan Nilai Ujian Nasional rata-rata Nilai Akhir (NA) seluruh mata pelajaran dari semua sekolah menengah pertama, Nilai Akhir merupakan gabungan dari Nilai Sekolah dan Nilai Ujian Nasional	Dinas Pendidikan	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Angka harapan hidup	rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Dinas Kesehatan	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
	2 Angka kematian Ibu	Jumlah kasus kematian ibu hamil per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun	Dinas Kesehatan	Laporan Tahunan Perangkat Daerah

	3	Angka kematian bayi	jumlah kematian bayi berumur dibawah 1 tahun selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
	4	Prevalensi balita gizi buruk	persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita	Dinas Kesehatan	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
Menurunnya angka kemiskinan	1	Angka kemiskinan	persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan.	- Bappeda - Dinas Sosial - Dinas Kominfo	Laporan Tahunan dan Data Statistik
Menurunnya pengangguran	1	Tingkat pengangguran terbuka	persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro - Dinas Kominfo	Laporan Tahunan dan Data Statistik
Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	1	prosentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial	jumlah PMKS yang mandiri dibanding jumlah PMKS keseluruhan	Dinas Sosial	Laporan Tahunan Perangkat Daerah

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA
MISI III : Membangun Perekonomian Masyarakat Dengan Menggerakkan Potensi Daerah Didukung Infrastruktur Yang Memadai

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Menguatnya kondisi perekonomian daerah	2 1 Laju pertumbuhan ekonomi	4 - Bappeda - Dinas Kominfo	5 Laporan Tahunan dan Statistik SKPD Data
2	Tingkat inflasi	3 perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat	- Bappeda - Dinas Kominfo	Lap. Tahunan Perangkat Daerah dan Data Statistik
3	PDRB per kapita	suatu proses atau peristiwa kenaikan tingkat harga barang-barang secara umum	- Bappeda - Dinas Kominfo	Lap. Tahunan Perangkat Daerah dan Data Statistik
1	Prosentase Koperasi mandiri	nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
2	Prosentase Peningkatan Usaha Baru	jumlah koperasi yang mandiri terhadap jumlah koperasi yang terdaftar	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Laporan Tahunan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kemandirian usaha mikro dan koperasi

1 Prosentase Koperasi mandiri

2 Prosentase Peningkatan Usaha Baru

jumlah koperasi yang mandiri terhadap jumlah koperasi yang terdaftar

penambahan jumlah wira usaha baru terhadap keseluruhan jumlah wira usaha yang ada

Meningkatnya kinerja sektor industri	1	persentase pertumbuhan industri	penambahan jumlah industri baru terhadap keseluruhan jumlah industri yang sudah ada	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Laporan Tahunan Peringkat Daerah
Meningkatnya kinerja sektor pariwisata daerah	1	Jumlah kunjungan wisatawan	jumlah wisatawan yang datang ke lokasi wisata di suatu wilayah kabupaten dalam satu tahun	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Laporan Tahunan Peringkat Daerah
Meningkatnya daya saing sektor pertanian	1	Persentase Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian dan perikanan	persentase kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	- Dinas Pertanian - Dinas Perikanan - Dinas Kominfo	Laporan Tahunan Peringkat Daerah dan Data Statistik
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	1	Tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita (%)	ketersediaan energi/protein perkapita perhari dikali kandungan energi/protein dibagi 100	Dinas Pangan	Laporan Tahunan Peringkat Daerah
Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah	1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	panjang jalan dalam kondisi baik dan nyaman untuk dilalui kendaraan dibanding jumlah keseluruhan panjang jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan Tahunan Peringkat Daerah

	2	jumlah penduduk yang dapat mengakses air bersih dengan mudah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pendudukan	Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang	Laporan Tahunan Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas lingkungan	1	<p>Indeks lingkungan (IKLH)</p> <p>kualitas hidup</p> <p>gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu, dengan indikator yang digunakan antara lain: Indeks Kualitas / Pencemaran Air; Indeks Kualitas / Pencemaran Udara; Indeks Tutupan Hutan/Lahan</p>	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Tahunan Perangkat Daerah

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA

MISI IV : Meningkatkan Keselehan Sosial Dan Harmonisasi Antar Seluruh Lapisan Masyarakat

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1 Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban	2 1 Jumlah konflik bernuansa SARA 2 Angka kriminalitas	3 Jumlah kejadian terkait konflik keagamaan penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk	4 - Sekretariat Daerah - Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja	5 Laporan Tahunan Perangkat Daerah Laporan Tahunan Perangkat Daerah
3	Persentase penyelesaian pelanggaran keamanan dan ketertiban	jumlah pelanggaran K3 yang dapat diselesaikan dibanding jumlah kejadian pelanggaran yang ditangani	Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Tahunan Perangkat Daerah

BUPATI PACITAN



INDARTATO